

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Huizink, J.B. *Insolventie*. Jakarta: Pusat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2007.
- Leks, Eddy. *Panduan Praktis Hukum Properti (Memahami Problematika Hukum Pertanahan, Perumahan, Serta Pengembangannya)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Nainggolan, Bernard. *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit*. Bandung: PT. Alumni, 2014.
- *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen & Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Suryana, Daniel. *Hukum Kepailitan: Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Bandung: Pustaka Sutra, 2007.

Syahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement Verdoning Juncto UU Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Tumbuan, Fred B.G. *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wijaya, Andika. *Hukum Bisnis Properti di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017.

### **TUGAS AKHIR**

Ardytia, Wisnu. 2009. *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)*. Tesis. Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Kasih, Ekawahju. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren dan Debitor Dalam Proses Pengajuan Kepailitan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*. Tesis. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Republik Indonesia. 1996. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan

Tanah. Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1996. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632.

\_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

\_\_\_\_\_. 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

\_\_\_\_\_. 2011. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252.

\_\_\_\_\_. 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lembaran Negara Nomor 221 Tahun 2014.

\_\_\_\_\_. 1999. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang. Lembaran Negara Nomor 142 Tahun 1999.

Mahkamah Agung. 2018. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77 / DJU / SK / HM02.3 / 2 / 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

\_\_\_\_\_. 2018. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

#### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Januari 2014.